

PERKEMBANGAN SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dessy Maulina¹
M. Rusmin Nuryadin²
dessy.maulina@ulm.ac.id

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT^{1,2}

Abstract,

Economic growth can be driven by increasing the Gross Regional Domestic Product (GDP) of a region by looking at which sectors are the base or non-base sectors. This study aims to determine economic growth in the basic and non-base sectors in 13 regencies/cities in South Kalimantan. with a quantitative method using the LQ (Loqation Quetient) index analysis technique using secondary data, namely Regency/City data in South Kalimantan. The results show that the agricultural sector for several regions is still the basis sector. cities in South Kalimantan can be seen from $LQ > 1$. Then the sector can be interpreted to be superior and if the LQ value < 1 then the sectors in the districts/cities in South Kalimantan are not superior or not dominant.

Keywords: PDRB, Location Quetient, Base Sector, Non Base Sector

Abstrak,

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dengan melihat sektor-sektor mana yang menjadi sektor basis atau bukan basis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada sektor basis dan non basis pada 13 kabupaten/kota di Kalimantan selatan. Analisis dilakukan dengan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis indeks LQ (Loqation Quetient) dengan menggunakan data sekunder yaitu data PDRB Kabupaten/Kota DI Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian untuk beberapa wilayah masih menjadi sektor basis. Bahwa sektor basis maupun bukan basis di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat dari $LQ > 1$. Maka sektor tersebut dapat di katakan unggul dan apabila nilai $LQ < 1$ maka sektor – sektor yang ada pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tidak unggul atau tidak dominan.

Kata Kunci: PDRB, Location Quotient, Sektor Basis, Sektor NonBasis

PENDAHULUAN

Setelah kewenangan yang dimiliki masing - masing daerah termasuk Kabupaten/kota melalui otonomi daerah menjadi dasar setiap kabupaten kota untuk terus mendorong pembangunan daerahnya semakin baik. Pencapaian sesuai target-target pembangunan yang ingin dicapai wilayahnya masing-masing. Pembangunan ekonomi di isyaratkan mengarahkan kehidupan masyarakat yang jauh lebih sejahtera. Yang seharusnya tidak terfokus pada satu sektor saja namun bisa merata dalam semua sektor pembangunan. Berkaca dari itu maka PDRB masing-masing daerah harus semakin digenjot untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi bergerak dengan cepat dan menghasilkan sektor-sektor yang merupakan basis pada suatu wilayah.

Sektor basis menurut teori adalah dimana suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan terhadap barang dan jasa dari luar daerah sebagai faktor utama

(Arsyad, 1997; R. Jumiyanti, 2018).

Dengan mengetahui sektor basis dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang menentukan pembangunan suatu daerah, sedangkan sektor non basis menjadi sektor pendukung pembangunan namun dipengaruhi pada perkembangan pembangunan. Aktivitas sektor basis adalah kemampuan sektor untuk tumbuh yang menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas sektor non basis merupakan sektor sekunder artinya tergantung perkembangan yang terjadi dari pembangunan yang menyeluruh.

Konsep Pembangunan Ekonomi

Konsep pembangunan ekonomi dapat diartikan suatu daerah mampu mengembangkan kegiatan ekonominya berdasarkan ruang atau dalam cakupan suatu wilayah (Arsyad, 2015). Pembangunan Ekonomi juga merupakan program, kebijakan atau kegiatan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas

hidup masyarakat. Pembangunan sendiri memiliki arti segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satuan nilai tambah dalam melihat potensi dari sektor-sektor perekonomian guna meningkatkan pendapatan masyarakat. PDRB dapat pula diartikan sebagai nilai tambah dari suatu barang dan jasa dalam berbagai sektor ekonomi didalam satuan waktu tertentu (R. Jumiyanti, 2018). PDRB merupakan suatu nilai untuk melihat kinerja pembangunan masing-masing sektor di daerah

Wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata yang dapat dinikmati oleh rakyat secara keseluruhan merupakan makna dari pembangunan itu sendiri. Menstimulasi perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah, mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru memperkuat kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta dalam membangun dan mengelola sumber daya yang ada dalam suatu wilayah dapat diartikan

sebagai proses pembangunan ekonomi suatu daerah.

Seiring dengan makin bertambahnya penduduk suatu wilayah diharapkan kemampuan suatu wilayah untuk terus dapat membangun daerahnya dari sisi pendapatannya tidak menjadi bumerang dengan meningkatnya penduduk tetapi tetapi malah lebih mendorong kinerja sektor-sektor lapangan usaha di kabupaten/kota

Kalimantan Selatan sebagai salah Provinsi yang memiliki kekayaan melimpah khususnya dari hasil hutan dan tambangnya, sektor agraris dan tambahnya namun tidak menutup sektor-sektor lain juga bertumbuh.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu proses perubahan dari tahun ketahun sektor -sektor dalam perekonomian khususnya didalam PDRB (Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, 2022). Proses peningkatan output secara konstan dalam jangka panjang. Suatu proses terjadinya peningkatan

PDRB rill juga dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Ekonomi suatu wilayah dapat diartikan tumbuh dengan baik apabila output rillnya tumbuh, baik tumbuh secara konstan atau bisa sebaliknya. Kenaikan pendapatan perkapita merupakan gambaran dari laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Agar mendorong terus meningkatnya pertumbuhan pendapatan perkapita, maka perlu sentuhan dari pemerintah dalam meletakkan prioritas yang tinggi untuk pembangunan daerah dengan memaksimalkan psumber daya yang ada.

Penelitian terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada sektor basis dan non basis diantaranya Azhar et al., (2005); Hutapea et al., (2020); Nugraha Rusli et al., (2021); R. Jumiyantri, (2018); Tutupoho, (2019); Wicaksono, (2019) Penelitian ini berbeda dari sebelumnya yaitu memilih fokus pada 13 kabupaten/kota di kalimantan selatan. Data yang digunakan merupakan data dari 2012 hingga 201

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan indikator Indeks Location Quotient, yang merupakan salah satu ukuran untuk melihat suatu wilayah dari sisi sektor mana yang merupakan sektor basis pertumbuhan ekonominya. Menurut Arief Daryanto dan Yundi Hafizrianda (2010) dalam Susuanto & Zairin (2020) Indikator yang dapat digunakan dalam menghitung sektor-sektor basis disuatu wilayah dan melihat potensinya adalah dengan menggunakan indeks LQ (Location Quotient) yaitu indikator yang sederhana yang mampu menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan daerah diatasnya atau wilayah referensi.

LQ memiliki dua cara dalam perhitungannya melalui pendekatan nilai tambah atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan tenaga kerja. Nilai menunjukkan $LQ > 1$ diartikan sektor tersebut menjadi sektor basis yang menjadi keunggulan suatu daerah dan dapat pula di jual keluar daerah atau dikirim keluar

daerah. Apabila nilai $LQ < 1$ menunjukkan sektor itu bukan sektor basis atau dapat diartikan sektor tersebut bisa di beli dari luar daerah. Untuk nilai $LQ = 1$ diartikan sektor tersebut tertutup tidak ada aktivitas mengirim keluar daerah atau membeli dari luar daerah.

Jenis dan sumber data adalah data sekunder yang diambil dari data Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Selatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu Indeks LQ (Location Quotient) yang sederhana dengan rumus :

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt}$$

Keterangan

Vi = Jumlah PDRB suatu sektor *i* pada Kabupaten/Kota (13 Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan)

Vt = Jumlah Total PDRB Kabupaten/Kota (13 Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan)

Yi = Jumlah PDRB sektor *i* pada Provinsi Kalimantan Selatan

Yt = Jumlah total PDRB sektor Provinsi Kalimantan Selatan

Kriteria:

1. Apabila hasil dari perhitungan LQ bernilai > 1 , diartikan bahwa sektor basis pada daerah tersebut
2. Apabila hasil dari perhitungan LQ bernilai < 1 , diartikan bahwa sektor non basis pada daerah tersebut
3. Apabila hasil dari perhitungan LQ bernilai $= 1$, diartikan bahwa sektor tersebut dikatanswasembada (self sufficiency) namun sektor ini memiliki kecenderungan yang tertutup dalam artian tidak melakukan transaksi keluar wilayah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum PDRB Kalimantan Selatan

Berikut ini adalah gambaran Produk Domestik regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan.

No.	Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan;	14.490.150,70	14.967.328,00	15.636.188,70	16.013.299,84	16.600.744,06	17.294.992,31	17.981.751,81
2	Pertambangan dan penggalian;	28.667.199,60	29.824.405,40	30.491.767,30	30.287.696,54	30.396.552,29	31.641.061,04	32.971.685,74
3	Industri pengolahan	12.641.814,60	13.106.241,20	13.573.445,00	14.162.833,70	15.078.392,99	15.924.229,99	16.598.109,16
4	Pengadaan listrik dan gas	76.829,30	80.970,00	99.240,70	127.661,28	133.955,63	138.778,16	149.293,39
5	Pengadaan air	349.105,90	358.575,60	391.232,60	413.657,83	445.363,01	479.849,66	512.638,14
6	Konstruksi;	6.813.377,60	7.214.398,70	7.675.542,90	8.163.603,41	8.590.136,77	9.086.567,33	9.621.524,89
7	Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi;	7.346.633,10	7.952.705,20	8.599.870,10	9.255.151,38	9.950.196,39	10.726.031,89	11.528.507,70
8	Transportasi dan pergudangan;	5.174.724,50	5.551.120,60	5.914.587,20	6.330.150,70	6.781.121,16	7.246.427,21	7.751.309,67
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum;	1.679.874,60	1.807.330,20	1.925.497,50	2.046.409,98	2.184.413,50	2.333.899,28	2.497.506,12
10	Informasi dan komunikasi;	3.004.945,70	3.214.576,20	3.515.928,30	3.810.741,59	4.145.202,05	4.474.496,43	4.782.740,28
11	Jasa Keuangan	2.760.226,90	3.149.581,90	3.358.241,50	3.518.583,75	3.790.698,67	4.018.163,31	4.188.555,39
12	Real Estate	2.032.486,80	2.174.932,00	2.299.864,90	2.427.807,14	2.587.345,38	2.715.212,76	2.859.291,63
13	Jasa Perusahaan	498.848,40	537.813,70	575.623,40	614.299,69	664.625,11	712.080,99	766.722,50
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminana Sosial	4.983.664,20	5.273.183,40	5.559.981,70	6.044.512,74	6.167.901,63	6.315.380,91	6.557.664,37
15	Jasa Pendidikan	3.683.162,30	3.975.295,30	4.304.961,90	4.590.535,13	4.906.056,57	5.230.245,23	5.597.185,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.517.901,00	1.656.718,50	1.762.193,50	1.893.551,11	2.065.644,08	2.180.392,36	2.305.156,91
17	Jasa lainnya	976.893,50	1.005.360,50	1.095.230,50	1.162.620,70	1.255.223,48	1.337.946,79	1.436.738,77
PDRB		96.697.838,70	101.850.536,40	106.779.397,60	110.863.116,51	115.743.572,76	121.855.755,64	128.106.382,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan (2023)

Kalimantan Selatan di Indonesia tersohornya adalah dengan kekayaan tambangnya, hal ini dikarenakan tambang menjadi potensi hampir di beberapa kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan. Seperti di Kabupaten Tanah Bumbu, dan bagi wilayah yang sektor pertambangannya tidak tinggi masih di dukung sektor pertanian seperti seperti kabupaten HSS, Barito Kuala dan yang lain. Apabila dilihat dari Tabel 1 sektor pertambangan dan penggalan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2012 masing-masing sektor sebesar Rp. 28.667.199,60. Rp. 14.490.150,0 dan Rp. 12.641.814,60 terus mengalami kenaikan masing-masing pada tahun 2018 sebesar Rp. 32.971.685,74. Rp. 17.981.751,81 dan Rp. 16.598.109,16

Kontribusi wilayah

Setiap sektor ekonomi yang potensial atau memiliki kontribusi yang paling besar. Memiliki suatu indikasi bahwa sektor tersebut mampu untuk lebih dikembangkan lebih lanjut. tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan

sektor yang lain . Untuk mengetahui seberapa besar sektor-sektor pada PDRB memberikan kontribusi dalam ekonomi Kalimantan Selatan. dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Kontribusi PDRB persektor Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2012-2018 (dalam persen)

No	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	14,985	14.695	14,643	14,44	14,34	14,19	14,04
2	29,6462	29,283	28,556	27,32	26,26	25,97	25,74
3	13,0735	12,868	12,712	12,78	13,03	13,07	12,96
4	0,07945	0,0795	0,0929	0,115	0,116	0,114	0,117
5	0,36103	0,3521	0,3664	0,373	0,385	0,394	0,4
6	7,04605	7,0833	7,1882	7,364	7,422	7,457	7,511
7	7,59752	7,8082	8,0539	8,348	8,597	8,802	8,999
8	5,35144	5,4503	5,5391	5,71	5,859	5,947	6,051
9	1,73724	1,7745	1,8032	1,846	1,887	1,915	1,95
10	3,10756	3,1562	3,2927	3,437	3,581	3,672	3,733
11	2,85449	3,0924	3,145	3,174	3,275	3,297	3,27
12	2,10189	2,1354	2,1538	2,19	2,235	2,228	2,232
13	0,51588	0,528	0,5391	0,554	0,574	0,584	0,599
14	5,15385	5,1774	5,207	5,452	5,329	5,183	5,119
15	3,80894	3,9031	4,0316	4,141	4,239	4,292	4,369
16	1,56974	1,6266	1,6503	1,708	1,785	1,789	1,799
17	1,01025	0,9871	1,0257	1,049	1,084	1,098	1,122
PDRB	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Keterangan:

- | | |
|--|---|
| 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan; | 9. Penyediaan Akomodasi dan makan minum; |
| 2. Pertambangan dan penggalian; | 10. Informasi dan komunikasi |
| 3. Industri pengolahan; | 11. Jasa keuangan; |
| 4. Pengadaan listrik dan gas; | 12. Real estate; |
| 5. Pengadaan air; | 13. Jasa perusahaan; |
| 6. Konstruksi | 14. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan Jaminan sosial |
| 7. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi; | 15. Jasa pendidikan |
| 8. Transportasi dan pergudangan; | 16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial |
| | 17. Jasa Lainnya |

Berdasarkan Tabel 2. sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi yang paling tinggi walaupun dari tahun 2012

sampai 2018 mengalami penurunan 29,64% menjadi 25,74 persen, Hal ini disebabkan pada 2013 produksi batu bara kembali terkoreksi, sampai

dengan 2015 seiring dengan anjloknya harga batu bara dunia. Pada 2015 harga batu bara dunia menyentuh \$52,13 per metrik ton, anjlok 38 persen dari akhir 2013 sebesar \$84,34 per metrik ton, Anjloknya harga batu bara menyebabkan banyak perusahaan tambang terpaksa menghentikan sementara operasi dan PHK tak terhindari. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara ikut kena dampak.

Pada sektor kedua yang merupakan sektor tertinggi adalah sektor pertanian ,akan tetapi makin tahun sektor ini makin berkurang kontribusinya hal ini disebabkan kondisi lahan di Kalimantan Selatan yang makin tahun makin kurang kondusif, dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti sektor kontruksi yang sebagian menggunakan lahan pertanian,sehinggal pertanian semakin berkurang dan pendapatan disektor pertanian yang lebih kecil daripada sektor lainnya mengakibatkan sektor ini mulai ditinggalkan. Sedangkan sektor industri pengolahan kontribusinya

berfluatatif menunjang perekonomian di Kalimantan Selatan, walaupun kegiatan industri semakin berkembang di Kalimantan Selatan

Analisis Loqation Question

Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tentunya memliki beberapa sektor yang merupakan kekuatan dari masing-masing wilayah tersebut dalam memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri, bahkan mampu menjadi sektor komoditas unggulan sehingga wilayah bisa melakukan eksport dan dapat meningkatkan keuntungan bagi masing-masing wilayah. Metode Location Qoutient, dapat diketahui seberapa besar peranan sektor di suatu daerah/basis serta menentukan sektor mana yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut.

Untuk mengidentifikasi apa saja sektor unggulan antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan maka dilakukan menggunakan analisis Location Quotient. Kemudian hasil analisis perhitungannya akan terbagi atas 2 kriteria, yakni unggul apabila nilai $LQ > 1$ dan tidak unggul apabila nilai $LQ < 1$. Kota Banjarmasin yang

terkenal sebagai kota seribu sungai apabila dilihat dari kontur tanahnya yang juga rawa dan luas wilayahnya hanya 72Km² dari luas Kalimantan Selatan menyebabkan sektor –sektor

yang membutuhkan lahan luas makin tahun makin berkurang kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di Banjarmasin.

Tabel 3 Analisis Loqation Quetient

No.	Banjarmasin	Banjarbaru	Banjar	Tapin	HSS	HST	HSU	Balangan	Tabalong	Tanah Laut	Tanah Bumbu	Kotabaru	Barito Kuala
1	0,18	0,16	1,24	1,39	1,86	1,83	1,24	0,73	0,70	1,27	1,09	1,32	2,03
2	0,00	0,15	0,79	1,28	0,40	0,03	0,01	2,53	2,05	1,19	1,68	0,90	0,00
3	1,46	0,64	0,51	0,50	0,61	1,17	0,80	0,12	0,53	0,84	0,52	2,49	1,34
4	3,01	2,04	1,05	0,70	0,61	1,30	0,92	0,22	0,32	0,63	0,36	0,29	0,85
5	3,08	1,66	0,56	0,78	0,94	1,30	1,99	0,50	0,60	0,43	0,23	0,21	0,68
6	1,35	2,11	1,30	0,70	1,09	1,19	1,44	0,48	0,62	0,87	0,76	0,67	1,82
7	1,46	1,30	1,50	0,98	1,06	1,20	1,61	0,48	0,69	1,08	0,70	0,49	1,34
8	1,77	3,38	0,77	0,52	0,90	0,85	1,35	0,26	0,29	0,92	0,93	0,90	0,63
9	1,77	1,52	1,60	1,12	1,93	1,95	1,40	0,14	0,63	0,74	0,43	0,30	1,32
10	1,96	1,58	1,05	1,05	1,33	1,30	1,17	0,34	1,01	0,82	0,86	0,13	0,63
11	4,00	0,57	0,65	0,31	0,61	0,63	0,94	0,07	0,44	0,40	0,42	0,32	0,56
12	1,71	1,09	1,58	0,63	1,15	1,56	1,70	0,36	0,46	0,87	0,82	0,43	1,61
13	4,42	0,77	0,53	0,18	0,20	0,33	0,65	0,09	0,39	0,49	0,38	0,23	0,26
14	0,97	2,33	1,20	1,25	1,66	1,86	2,28	0,63	0,60	0,88	0,52	0,67	1,43
15	1,14	2,22	1,21	1,10	1,76	1,71	2,23	0,60	0,68	0,83	0,78	0,42	1,30
16	2,58	1,86	1,19	0,93	1,61	1,10	1,25	0,38	0,31	0,52	0,44	0,49	0,75
17	2,06	1,65	1,36	0,76	1,50	1,25	2,03	0,37	0,49	0,60	0,62	0,52	0,72

Sumber: BPS Provinsi KALSEL (Data Diolah)

Keterangan:

- | | |
|--|---|
| 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan; | 9. Informasi dan komunikasi; |
| 2. Pertambangan dan penggalian; | 10. Jasa keuangan; |
| 3. Industri pengolahan; | 11. Real estate; |
| 4. Pengadaan listrik dan gas; | 12. Jasa perusahaan; |
| 5. Pengadaan air; | 13. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial |
| 6. Konstruksi; | 15. Jasa pendidikan; |
| 7. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi; | 16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; |
| 8. Transportasi dan pergudangan; | 17. Jasa lainnya; |

Apabila dilihat pada tabel 3 makin tahun sektor agraris semakin berkurang menjadi sektor basis apalagi sebagai sektor yang masih mempertahankan tradisionalnya atau perekonomian lokal, pastinya akan mengurangi minat untuk sector agraris dicintai atau diminati sebagai lapangan pekerjaan utama masyarakatnya di Kalimantan Selatan berikut ini berdasarkan tabel hasil perhitungan Location Quotien (LQ) Kabupaten /Kota di Kalimantan Selatan.

Pada tabel 3 terlihat bahwa secara umum Kota Banjarmasin yang menonjol adalah sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya karena hasil $LQ > 1$.

Sementara untuk sektor pertanian dan terlebih lagi sektor pertambangan tidak memiliki peranan sama sekali karena Kota Banjarmasin tidak memiliki wilayah yang

terkandung hasil tambang karena itu kedua sektor tersebut $LQ < 1$ bukan merupakan sektor basis. Hal itu didukung pula oleh keadaan alam yang tidak mendukung lagi dilihat dari lahan yang mulai berkurang terlebih makin meningkatnya kawasan pemukiman karena banyaknya penambahan penduduk tiap tahun sehingga kawasan pertanian semakin menyempit. Sedangkan untuk sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial juga tidak memiliki peranan karena perpindahan pusat pemerintahan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

Kota Banjarbaru semakin tahun semakin berkembang pembangunan ekonomi dari infrastruktur terlebih dengan berpindahnya pusat pemerintahan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru yang mengakibatkan migrasi penduduk semakin tinggi di kota tersebut. Pada Kota Banjarbaru sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan

minum, informasi dan komunikasi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Merupakan sektor yang unggul angka $LQ > 1$. Untuk sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, jasa keuangan dan jasa perusahaan belum menjadi sektor yang unggul/basis karena $LQ < 1$. Hal ini terlihat mayoritas penduduk lebih banyak bekerja pada sektor-sektor yang unggul atau basis dan wilayahnya pun yang tidak memiliki sumber daya alam yang tinggi dan tidak didukung dari sektor keuangan yang masih sedikit tumbuh di kota Banjarbaru.

Kabupaten Banjar yang berpusat pada Martapura memiliki gelar kota serambi Mekah. Kabupaten Banjar memiliki batasan wilayah sangat dekat dengan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. 12,05% dari Provinsi Kalimantan Selatan adalah luas wilayah Kabupaten Banjar. Sektor-sektor yang menjadi penopang perekonomian di Kabupaten Banjar antara lain sektor pertanian, pengadaan listrik dan gas,

kontruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social dan jasa lainnya. Hal ini ditandai dengan nilai $LQ > 1$ dari masing-masing sektor tersebut. Sektor pertambangan dan penggalian walau rata-rata LQ sebesar 0,79 mendekati angka 1 namun tidak menjadi unggulan sektor tersebut di kabupaten Banjar karena $LQ < 1$, sementara sektor lain non unggulan $LQ < 1$ seperti industri pengolahan, pengadaan air, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan jasa perusahaan.

Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten yang kaya sumber daya alam khususnya sektor pertambangan dan petanian. Dengan memiliki luas wilayah cukup besar 2700,82 cukup mendukung sektor pertambangan berkembang di wilayah tersebut. Pada tabel 3 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi,

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, dan jasa pendidikan angka $LQ > 1$ sehingga sektor-sektor tersebut menopang perekonomian di Kabupaten Tapin. Sedangkan industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya bukan merupakan sektor basis.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk sektor-sektor yang menonjol adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran dan reparasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social dan jasa lainnya karena besaran LQ nya > 1 . Untuk sektor-sektor yang tidak menonjol adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, transportasi dan pergudangan, jasa

keuangan dan jasa perusahaan menunjukkan $LQ < 1$.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah sektor penopangnya yang dapat tergambar dari $LQ > 1$ adalah pada sektor-sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran dan reparasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan lainnya. Sementara sektor yang tidak unggul pada Tabel 3 adalah sektor pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan jasa perusahaan yang $LQ < 1$.

Sejak tahun 2005 setelah Hulu Sungai Utara mengalami pemekaran dan terbentuklah Kabupaten Balangan maka beberapa sektor yang sebelumnya menjadi salah satu penopang perekonomian di Hulu Sungai Utara adalah sektor pertambangan, namun setelah terjadi pemekaran sektor mengalami

penurunan bahkan tidak berkembang karena wilayah yang kaya sumber alam tersebut masuk pada wilayah Balangan.

Pada tabel 3 sektor yang menonjol di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana angka $LQ > 1$ yakni pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran dan reparasi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Untuk sektor non basis di Hulu Sungai Utara adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan jasa perusahaan ditunjukkan $LQ < 1$.

Kabupaten Balangan adalah merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Hulu Sungai utara. Sebagai salah satu kabupaten yang muda Balangan terus membangun termasuk perekonomiannya. Pada tabel 3, LQ tersebut satu-satunya sektor yang paling menonjol adalah

sektor pertambangan dan penggalian karena $LQ > 1$ sedangkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran dan reparasi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya dengan angka LQ menunjukkan $LQ < 1$.

Kabupaten Tabalong kabupaten paling ujung dari provinsi Kalimantan Selatan adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 3766,97 Km² atau 9,72 persen dari Provinsi Kalimantan Selatan sektor tambang yang sangat tinggi apabila dilihat dari PDRB dan keunggulan dari sektor ini tercermin pada tabel LQ berikut. Pada Tabel 3 ada dua sektor yang menonjol karena $LQ > 1$ yakni sektor pertambangan

dan penggalian dan sektor informasi dan komunikasi sedangkan selain dua sektor tersebut 15 sektor lainnya nilai $LQ < 1$ sehingga tidak menonjol untuk menopang perekonomian di Kabupaten Tabalong.

Pada Kabupaten Tanah Laut sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi menjadi sektor unggulan pada Kabupaten tersebut karena memiliki $LQ > 1$ dan didukung dengan kondisi tanah pada Kabupaten Tanah Laut sangat cocok untuk perkembangan sektor pertanian dan di dukung pula dengan kekayaan alamnya yang besar yaitu hasil tambangnya.

Sementara sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social dan

jasa lainnya tidak memiliki keunggulan dikarenakan nilai $LQ < 1$.

Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotabaru memiliki luas 12,92 persen dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terdapat dua sektor unggul karena memiliki $LQ > 1$ yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian. Sementara sektor yang tidak menonjol karena memiliki nilai $LQ < 1$ yakni sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran dan reparasi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social dan jasa lainnya. Mengandung makna bahwa sektor yang bukan basis berarti tidak dapat pula dikirim ke luar wilayah.

Pada tabel 3 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri

pengolahan lebih menonjol dibanding sektor yang lain, dimana nilai $LQ > 1$ untuk sektor pertambangan dan penggalian sebenarnya cukup besar karena LQ mendekati angka 1 namun LQ tersebut masih dibawah atau $LQ < 1$ s di Kabupaten tersebut, sektor itu tidak menopang perekonomian di Kabupaten Kotabaru. Untuk sektor yang $LQ < 1$ atau tidak menonjol seperti sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya.

Kabupaten Barito Kuala yang ibu kotanya Marabahan memiliki luas 2996, 46 Km² terkenal sebagai kabupaten yang menonjol pada sektor pertanian, kehutan dan perikanan, hal ini dapat dari hamper sebagian penduduknya bekerja pada sektor tersebut dan dari kondisi alamnya yang sangat cocok untuk

pengembangan sektor agraris. Tergambar pada tabel LQ berikut. Untuk sektor-sektor yang menonjol pada Kabupaten Barito Kuala di karenakan $LQ > 1$ yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industry pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dan jasa pendidikan. Sedangkan sektor pertambangan sama seperti Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki sumbangan sektor pertambangan dan penggalian karena kondisi alamnya yang rawa yang tidak memiliki memiliki tambang sehingga $LQ < 1$, sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan jaminan sosial serta jasa lainnya masing masing sektor memiliki $LQ < 1$ sehingga tidak potensial pada Kabupaten tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Provisi kalimantan Selatan perkemabangan sektor basis dari 13 kabupaten Bahwa dimana di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat dari $LQ > 1$. Maka sektor tersebut dapat di katakan unggul dan apabila nilai $LQ < 1$ maka sektor – sektor yang ada pada kabupaten/kota dikalimantan selatan tidak unggul atau tidak dominan. Sektor basis di 8 Kabupaten dipegang oleh Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, Penyediaan Akomodasi dan makan minum, Informasi dan komunikasi dan Jasa pendidikan.

Saran

Setiap daerah yang menjadi sektor basis di harapkan pemerintah lebih dapat memberikan suntikan dana agar sektor tersebut dapat lebih menjadi sektor yang unggul sedangkan sektor yang kurang dominan/non basis pemerintah lebih intensif untuk membangun sektor tersebut dan dapat dimasukkan pada arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Kabupaten /Kota Di Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN.
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*. In *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan* (Vol. 05, Issue 01).
- Azhar, Lies Fuaidah, S., & Abdussamad, M. N. A. (2005). Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *SOCA: Socioeconomics of Agriculture and Agribusiness*, 5(2), 1–9.
- Hutapea, A., Koleangan, R. A. M., Rorong, I. P. F., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2020). Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Serta Daya Saing Ekonomi Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 1–11.
- Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, A. (2022). *Ekonomi Pembangunan* (R. Kusumaningrunm (ed.)). Bhakti Persada.
- Nugraha Rusli, A., Roza, A., & Mulya Rusli, A. (2021). Analisis Sektor Basis dan Sektor Non Basis dalam Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan di

Kota Padang. *Jurnal Saintis*,
21(01), 45–52.
[https://doi.org/10.25299/saintis.2021.vol21\(01\).6537](https://doi.org/10.25299/saintis.2021.vol21(01).6537)

R. Jumiyaniti, K. (2018). Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 29.
<https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.112>

Susyanto, G., & Zairin, M. (2020). Analisis Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Bogor (Studi Kasus dengan Data PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017). *Jurismata*, 2(1), 37–48.

Tutupoho, A. (2019). Analisis Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota). *Jurnal Cita Ekonomika*, 13(1), 1–18.
<https://doi.org/10.51125/citae.konomika.v13i1.2647>

Wicaksono, A. E. (2019). Analisis Sektor Basis dan Non Basis pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Madiun Tahun 2013-2017. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 3(2), 207–219.
<https://doi.org/10.15642/oje.2019.3.2.207-219>